BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Maksud penelitian ini ialah menguji tingkat pengungkapan wajib LKPD dengan menggunakan beberapa faktor yang berpotensi mempengaruhi, seperti jumlah anggota badan legislatif, utang, dan jumlah penduduk. Setelah dilakukan analisis dan pengujian hipotesis, penelitian ini menemukan bahwa rata-rata tingkat pengungkapan pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia pada tahun 2022 sebesar 75.60%. Nilai ini menunjukkan bahwa apabila dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, rata-rata pengungkapan sudah lebih baik. Berikutnya, setelah dilakukannya serangkaian proses penelitian, analisis data dan pengujian hipotesis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Variabel jumlah anggota badan legislatif berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia. Hasil ini menggambarkan bahwa jumlah anggota badan legislatif berbanding lurus dengan tingkat pengungkapan LKPD, yang dapat diartikan dengan semakin banyak jumlah anggota badan legislatif di suatu daerah, akan meningkatkan pengungkapan LKPD daerah tersebut. Salah satu faktor yang dapat berperan dalam temuan ini yaitu kinerja anggota badan legislatif (DPRD) yang sudah cukup baik dalam menjalankan tugasnya dengan memberikan tekanan atau pemeriksaan kepada pemerintah daerah agar memberikan tingkat pengungkapan yang optimal.
- b. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa utang tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia. Hasil yang diperoleh atas penelitian ini mengungkapkan bahwa besaran utang suatu pemerintah daerah tidak mempengaruhi tingkat pengungkapan LKPD pemerintah daerah tersebut. Hal ini dapat diakibatkan karena utang yang dimiliki oleh pemerintah daerah tidak cukup memberikan tekanan atau motivasi kepada pemerintah untuk melaporkan keuangan daerahnya dengan lebih baik sebagaimana dituangkan dalam hipotesis.
- c. Variabel jumlah penduduk tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat

pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia. Hasil yang ditemukan oleh peneliti mengungkapkan bahwa jumlah penduduk bukan merupakan faktor utama yang mampu mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan pengungkapan LKPD. Temuan ini dapat disebabkan oleh jumlah penduduk tidak memberikan adanya penekanan terhadap pemerintah atau tidak adanya permintaan dari penduduk terhadap peningkatan kualitas pengungkapan LKPD dari pemerintah.

5.2 Saran

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini menyarankan beberapa hal agar manfaat penelitian yang diharapkan dapat terpenuhi. Saran tersebut antara lain :

1) Saran Teoritis

Bagi peneliti selanjutnya, bisa menggunakan data lebih dari satu tahun guna sehingga dapat mengidentifikasi tren jangka Panjang dan melihat perkembangan terkait pengungkapan LKPD itu sendiri. Disamping itu, berdasarkan hasil yang diperoleh dari penelitian ini, ditemukan bahwa utang dan jumlah penduduk tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat pengungkapan LKPD. Sehingga bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan variabel lain, dan menambahkan jumlah variabel sehingga mampu menjabarkan proporsi yang lebih besar dari variabel dependen.

2) Saran Praktis

1) Bagi pemerintah daerah

Dengan kemajuan teknologi yang terus berkembang, diharapkan dapat dimanfaatkan pemerintah daerah dalam membantu proses penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Sehingga dapat menghasilkan pengungkapan yang lebih baik, dan dapat disajikan dalam format yang lebih seragam dan berkualitas. Tujuannya bukan hanya untuk meningkatkan pengungkapan, namun juga memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan dalam mengamati laporan keuangan.

2) Bagi BPK RI

Melihat hasil dari penelitian ini, dimana rata-rata pengungkapan wajib LKPD hanya berada pada nilai 78,49% maka diharapkan BPK selaku

regulator dapat mendorong serta menggalakkan adanya peningkatan pengungkapan wajib LKPD. Pengungkapan wajib, sesuai namanya harus disajikan secara penuh (100%), sehingga nilai 78,49% ini belum bisa dikatakan ideal.

3) Bagi Masyarakat

Informasi terkait LKPD yang dapat diakses dengan mudah diharapkan akan memicu masyarakat menjadi salah satu elemen yang bisa mendorong peningkatan pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. Tujuannya agar pengelolaan keuangan yang dilaksanakan oleh pemerintah dapat disajikan dengan lebih transparan serta akuntabel.